

## Perekonomian Gorontalo Memerlukan Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran Kredibel

**P**ERTUMBUHAN ekonomi Gorontalo di tahun 2016 sebesar 6,52 persen sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,22 persen. Capaian pertumbuhan tersebut terbilang moderat, sebab selama tahun 2016 perekonomian global masih belum pulih yang berdampak terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat secara visual pola pertumbuhan ekonomi Gorontalo cenderung sama dengan pergerakan ekonomi secara nasional, jika ekonomi nasional mengalami perlambatan, Gorontalo pun cenderung mengalami kondisi serupa. Tentu ini dapat diasumsikan bahwa perekonomian Gorontalo tingkat ketergantungannya cukup besar terhadap kondisi makro ekonomi nasional. Melemahnya kegiatan ekspor Indonesia dipastikan memiliki efek langsung terhadap penerimaan negara, karena itu sepanjang tahun 2016 target pencapaian penerimaan negara, utamanya dari pajak tidak tercapai. Rendahnya penerimaan negara tentu memiliki implikasi terhadap belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan dana transfer ke daerah. Sepanjang tahun 2016 belanja K/L dipangkas sebesar Rp. 65 triliun dan dana transfer sebesar Rp. 68 triliun. Adanya pemangkasan belanja pemerintah, maka Gorontalo pun sedikit kena imbas sebab ada pemangkasan dana transfer dan APBN yang dijalankan oleh Satuan Kerja Kementerian yang ada di Gorontalo. Ini kemudian berdampak terhadap perekonomian Gorontalo, khususnya dari sisi konsumsi (belanja) pemerintah perannya menurun dalam pembentukan PDRB Gorontalo pada kuartal ketiga dan keempat 2016. Sektor konsumsi rumah tangga tetap berkontribusi paling besar yakni 60,62 persen, ini tentu menjadi tidak ideal kinerja perekonomian wilayah dari sisi permintaan yang seharusnya diperkuat oleh sektor investasi dan interaksi perdagangan internasional (ekspor-impor).

Sektor investasi sendiri di Gorontalo masih cukup rendah, hal ini dapat dibaca dari porsi penyaluran kredit di Gorontalo lebih dari 60 persen untuk kredit konsumsi, sedangkan investasi kurang dari 20 persen. Kedepannya dibutuhkan perubahan struktur sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran dengan mendorong penguatan *investment driven*. Sedangkan dari sisi sektoral masih didominasi oleh sektor pertanian, pada tahun 2016 sektor pertanian menyumbang terhadap pembentukan PDRB Provinsi Gorontalo sebesar 37,44 persen, disusul sektor konstruksi sebesar 12,00 persen. Kedua sektor tersebut bila dikaji lebih mendalam merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Gorontalo, bahkan sektor pertanian sendiri

menyerap tenaga kerja sebanyak 171,104 (34,66 %) dari total angkatan kerja.

Hanya saja sektor pertanian dan sektor konstruksi merupakan kegiatan musiman, artinya pekerja disektor tersebut dalam waktu tertentu akan menjadi pekerja tidak penuh, atau masuk pada kelompok setengah pengangguran. Sementara sektor industri sendiri yang semestinya diharapkan dapat menjadi *primemover* pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penanda terjadinya perubahan struktur ekonomi Gorontalo hanya menyumbang sebesar 7,23 persen.

Dominannya sektor pertanian dan konstruksi menyumbang terhadap perekonomian Gorontalo yang merupakan kegiatan produksi musiman bagi sebagian pekerja disektor tersebut, tentu memiliki sensitivitas terhadap perubahan angka kemiskinan. Ini dikarenakan kedua sektor tersebut menjadi penyedia tenaga kerja terbesar, jika dikaitkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gorontalo terhitung rendah sebesar 2,76 persen lebih rendah secara nasional dan beberapa provinsi lainnya, namun angka kemiskinan cukup tinggi sebesar 17,63 persen, sebagian besar keluarga miskin diduga bekerja pada kedua sektor tersebut.

Sektor pertanian dipastikan sebagai sektor basis di Provinsi Gorontalo, malahan sektor pertanian tanaman pangan menjadi ekspor utama. Namun ditahun 2016, ekspor jagung mengalami penurunan, dilain sisi produksi jagung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Inipun menggambarkan kondisi anomali, dilain pihak ekspor jagung menurun tetapi produksi jagung meningkat. Asumsinya bila ekspor jagung menurun sepanjang tahun 2016, berarti terserap banyak di pasar domestik, atau diantara pulau karena tidak mungkin jagung terserap dipasar lokal, dikarenakan belum ada industri pengolahan jagung di Gorontalo. Sekalipun demikian, sektor pertanian sebagai unggulan dan kontribusi paling besar terhadap perekonomian, sayangnya porsi alokasi belanja sektor pertanian hanya sebesar 4,01 persen dari total APBN dan APBD. Ini mengindikasikan adanya kontradiksi dimana sektor pertanian penyokong utama, namun hanya mendapat alokasi anggaran yang minim, kurang dari 5 persen. Tak pelak bisa dinyatakan bahwa perhatian pemerintah dari sisi penganggaran untuk sektor pertanian cukup rendah, karena itu model perencanaan sektoral dan penganggaran kedepan perlu dilakukan perbaikan. Sektor-sektor unggulan dan berkontribusi besar sejatinya mendapatkan porsi pembiayaan yang lebih dibandingkan

Oleh  
**Muh. Amier Arham**

sektor-sektor non unggulan. Hanya saja jika ditinjau dari ruang fiskal yang tersedia dalam APBD Provinsi

Gorontalo cukup kecil kurang dari 40 persen. Besaran prosentase itulah dibagi habis ke sektor-sektor lainnya, sehingganya itu perencanaan anggaran perlu dilakukan perubahan mendasar dengan memfokuskan diri pada sektor yang kuat *me-leverage* pertumbuhan ekonomi Gorontalo.

Berbagai macam penjelasan serta uraian problem perekonomian Gorontalo yang cenderung kontradiksi seperti gambaran di atas, maka jelas memerlukan perbaikan perencanaan. Jika rencana kerja pemerintah daerah tidak menasar problem ekonomi yang paling mendasar seperti perubahan struktur ekonomi, maka target pencapaian penurunan angka kemiskinan secara drastis sulit tercapai. Hampir 10 tahun terakhir angka kemiskinan di Gorontalo berada dikisaran 17 - 18 persen, sementara pertumbuhan ekonomi boleh dikata tidak terlalu buruk (moderat). Ini artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi memiliki korelasi yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Masalah lain yang dihadapi oleh perekonomian Gorontalo adalah persoalan ketimpangan, jika diukur secara teoritis angka ketimpangan Gorontalo dengan menggunakan Indeks Gini Rasio masuk dalam kategori sedang. Namun jika dilakukan pengelompokan kategori tingkat ketimpangannya termasuk tinggi bersama dengan Provinsi DIY (0,42), Gorontalo (0,410), Jawa Timur dan Jawa Barat (0,402), Papua Barat (0,401), Sulawesi Selatan (0,400), Papua (0,399), DKI Jakarta (0,397), Banten (0,392) dan Sulawesi Tenggara (0,388).

Giri Rasio Gorontalo sepanjang tahun 2016 mengalami penurunan, dari 0,419 pada bulan Maret 2016 turun menjadi 0,410 pada bulan September 2016. Jika dibandingkan dengan angka Gini Rasio nasional (0,39) dan Gorontalo masih lebih tinggi, dan sangat berfluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pola ketimpangan yang terjadi di beberapa negara pada awalnya memang cenderung tinggi, tetapi dalam jangka waktu tertentu setidak dalam satu dekade pembangunan akan mengalami penurunan.

Tingginya angka Gini Rasio akan menghambat penurunan angka kemiskinan, dari berbagai macam studi empiris yang dilakukan oleh para ekonom, menunjukkan bahwa dengan distribusi pendapatan yang timpang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sulit mereduksi angka kemiskinan yang lebih signifikan. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang jumlah terbatas, sementara

kelompok masyarakat yang jumlah lebih besar porsi kue ekonomi yang didapatkan sedikit.

Jika dilihat faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan secara teoritis cukup banyak, namun jika dianalisis secara faktual salah satu faktor pendorong ketimpangan yang cukup tinggi di Gorontalo adalah kegiatan ekonomi cenderung terpusat di dua daerah yang bersebelahan, yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Malahan diduga bahwa belanja APBN 2016 lewat Satuan Kerja dan Dana Transfer realisasinya mencapai sebesar Rp. 9,825 triliun, lebih dari separuh belanja tersebut berputar di wilayah Kota Gorontalo. Menghadapi situasi seperti itu, maka diperlukan peran pemerintah daerah lewat perencanaan yang baik untuk mendorong distribusi kegiatan ekonomi tidak terlalu terpusat di Kota Gorontalo. Lewat perencanaan pembangunan dengan memperkuat orientasi pembiayaan di perdesaan maka diharapkan belanja APBN dan APBD terdistribusi secara merata berdasarkan kebutuhan diluar wilayah perkotaan.

Untuk memutuskan mata rantai permasalahan ekonomi maka ada beberapa skenario kebijakan dapat ditempuh oleh pemerintah daerah menghadapi tahun fiskal 2018 kedepan, antara lain: 1) Sektor pertanian memerlukan perhatian lebih dalam hal pembiayaan secara terintegratif, mulai dari budi daya, infrastruktur pendukung hingga pengolahan dan pemasaran produk pertanian. 2) Pengembangan kegiatan UMKM berbahan baku sektor potensi termasuk produk pertanian agar mata rantai kegiatan ekonomi berkembang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani di perdesaan yang banyak masuk dalam kategori kurang mampu. 3) Perlunya penguatan sektor industri pengolahan agar komoditi jagung di Gorontalo dapat menciptakan nilai tambah dan memiliki dampak ekonomi. 4) Pembiayaan pembangunan perlu diperkuat di wilayah perdesaan dalam rangka menggeser secara perlahan kegiatan ekonomi dari wilayah perkotaan. Harapannya model pilihan kebijakan seperti ini dapat menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah diintra Provinsi Gorontalo. 5) Sebagai daerah yang sangat bergantung terhadap transfer dari pusat, maka diperlukan kesungguhan menciptakan anggaran yang lebih efisien dan kredibel. Penghematan belanja yang tidak produktif perlu dilakukan pemangkasan secara radikal, termasuk volume pembiayaan perjalanan dinas baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.